



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM
UNIT KERJA : ANGGOTA BIDANG PENGUSAHAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ASEP LILI HOLILULLOH
2. Jabatan : DIREKTUR PENINGKATAN KINERJA DAN MANAJEMEN RISIKO
3. NHK : 518737

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.542.000.000**

1. Tanah Seluas 138 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI
Rp. 247.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/100 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
3. Tanah Seluas 320 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI
Rp. 150.000.000
4. Tanah Seluas 603 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL
SENDIRI Rp. 270.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA
BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 237.000.000**

1. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.
2.000.000
2. MOBIL, HONDA MDD4 1.5 E M-CVT Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 115.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT CKD Tahun 2018, HASIL
SENDIRI Rp. 120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 72.000.000**

D. SURAT BERTAHAP **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 280.070.562**

F. HARTA LAINNYA **Rp. 129.856.750**



Sub Total	Rp.	2.260.927.312
III. HUTANG	Rp.	254.836.633
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.006.090.679

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.